

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Mujiyono Tagih Utang Kemenkeu ke DKI Rp 4,9 T

Gambir, Warta Kota

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mendesak Kementerian Keuangan melunasi dana bagi hasil (DBH) kepada DKI sebesar Rp 7,5 triliun. DBH itu merupakan hak DKI dari pemerintah pusat untuk tahun 2019 dan kuartal II tahun 2020.

Menurut Mujiyono, DBH merupakan salah satu sumber anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 di Jakarta. Saat ini, piutang DBH tahun 2019 baru cair separuhnya.

"Harusnya piutang DBH Pemprov DKI dilunasi dong, jangan cuma separuh. Ini di sisi kewajiban tak dipenuhi, tapi sisi lain malah memojokkan Pemprov DKI," kata Mujiyono, Kamis (7/5).

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menkeu No 36/PMK.07/2020 tentang penetapan alokasi sementara kurang bayar DBH Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penanganan Covid-19, DKI hanya mendapatkan DBH Rp 2,56 triliun. Padahal, piutang DBH tahun lalu mencapai Rp 5,1 triliun dan DBH kuartal II tahun ini Rp 2,4 triliun.

"Bila ditotal DBH DKI dari Kemenkeu itu Rp 7,5 triliun, tapi baru dibayar Rp 2,56

triliun. Jadi, tidak benar DKI kehabisan uang. Anggarannya masih banyak," ujarnya.

Dia menilai, sisa utang Kemenkeu kepada DKI yang sekitar Rp 4,9 triliun itu bisa mencukupi kebutuhan warga miskin dan rentan miskin selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, Pemprov DKI tak mampu menyalurkan bansos untuk 1,1 juta kepala keluarga (KK) karena tak memiliki anggaran. Pemprov DKI meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KK tersebut.

Menurutnya, jumlah penerima bansos di DKI secara keseluruhan ada 4,7 juta kepala keluarga (KK). Rencana awal, 1,1 juta KK ditanggung pemerintah daerah, sedangkan sisanya 3,6 juta KK ditanggung pemerintah

pusat.

Namun DKI meralat dan meminta seluruhnya ditanggung pemerintah pusat. Hal ini diungkap Menkru pada rapat dengan DPR, Rabu (6/5).

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN, Zita Anjani menyoal pernyataan Menkeu. "Saya sangat menyayangkan pernyataan Menkeu seperti itu, seolah Pemprov angkat tangan," katanya melalui keterangan tertulis, kemarin.

"Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, tapi hindari untuk memojokkan di saat seperti ini. Rasanya kental politis, yang sudah baik saja belum tentu dibilang baik," katanya.

Sementara itu, Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan Pemprov menyiapkan dana penanganan Covid-19 hingga Rp 5 triliun. Dana itu ada pada pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Dana tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu dan jumlahnya dapat ditambah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor yakni kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial, termasuk bantuan sosial (bansos).

"Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua," ujar Anies melalui Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID), Kamis malam.

Sebelumnya, Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Catur Laswanto menyatakan, pemprov mengusulkan 2 juta KK di Jakarta untuk mendapatkan bansos dari pemerintah pusat.

Data 2 juta KK itu diusulkan melalui Kementerian Sosial

(Kemensos) namun belum ada jawaban resmi. Hal ini diungkap Catur dalam rapat virtual bersama Komisi E DPRD, Rabu (6/5).

Catur menjelaskan, pemerintah pusat pada April lalu memberikan bansos kepada 947.126 KK di DKI. Angka itu lebih kecil dari usulan Pemprov yang mencapai 1,19 juta KK. Catur menambahkan, sebanyak 1,19 juta KK yang diusulkan ini juga merupakan penerima bansos tahap pertama dari Pemprov DKI.

Pemprov berharap 2 juta KK itu dapat menerima bansos dari pemerintah pusat. "Kalau usulan tidak diterima semua, katakanlah mereka tetap memberikan seperti yang sekarang (947.126 KK), tentu kami harus berpikir untuk membantu warga dari sumber APBD," katanya. **(faf/Kompas.com)**